	Nomor SOP	065/600 /SATPOL.PP				
	Tanggal Pembuatan	2022				
	Tanggal Revisi					
	Tanggal Efektif	g september 2022				
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Disahkan oleh	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		PROVINSI HALIMANTAN BARAT,				
		1 N/ 10_ 1				
		SUHERMAN, S.H., M.H.				
DID AND DENIES AVAILABLE DENIES AND A DED AND A DESCRIPTION OF THE SECOND OF THE SECON						
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH		NIP.1970 110 200212 1 005				
SEKSI PENEGAKKAN	Nama SOP	Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor				
Dasar Hukum:	Kualifikasi pelaksana					
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat						
dengan Pemerintahan Daerah	Bapenda Provinsi Kalbar;					
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran						
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik						
Indonesia Nomor 6205);	Bapenda Provinsi Kal	bar;				
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan						
Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Operasional						
Satuan Polisi Pamong Praja;						
5. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional						
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;						
6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas						
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana						
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas						
Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas						
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita						
Daerah Tahun 2019 Nomor 71).						
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapar					
1. SOP Kegiatan Non Yustisi Razia Rokok		ovinsi Kalimantan Barat;				
2. SOP Melakukan tindakan Non Yustisi serta Razia terhadap PNS pada saat jam kerja di	2. Dokumen Pelaksana	Anggaran (DPA) SKPD;				
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	3. SK Kepala Satuan Po	lisi Pamong Praja tentang Pembentukan TIM				
3. SOP Kegiatan Razia Penegakkan dan Penertiban Tempat Hiburan Malam	4. Perangkat Komputer	100				
4. SOP Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	5. Alat Dokumentasi Ke	giatan;				
Peringatan	Pencatatan dan pendata	aan				
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bersama Bapenda	Sasaran Strategis, Indil	kator kinerja, target, program dan anggaran satu				
Provinsi Kalbar ini tidak akan berjalan lancar	tahun					

SOP Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Proses/ Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			$\neg \neg$		
		Tim	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kasat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	 a. membuat Surat Perintah Tugas dan disampaikan kepada Kasi untuk diperiksa b. Setelah di paraf oleh Kasi selanjutnya disampaikan kepada Kabid untuk dibuatkan Nota Dinas c. Nota Dinas disampaikan oleh Kabid kepada Kasat, melalui Sekretaris apabila Kasat menyetujui untuk ditanda tangan dengan Nota Dinas 		•		\Diamond		- Alat Tulis Kantor - Daftar nama- nama Tim dan Nota Pengantar - Nota Dinas	1 hari	Draft SK Tim SK yang ditanda tangan Kasat SK yang ditanda	
2	Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi : a. Uraian Kegiatan b. Maksud dan Tujuan c. Tempat dan Waktu Pelaksanaan d. Cara Pelaksanaan kegiatan e. Hasil kegiatan						 Alat Tulis Kantor Dokumen Pelaksana Anggaran SK Tim 	1 hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	
	Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor a. Menyiapkan SPT untuk pelaksanaan kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor Bersama Bapenda Provinsi Kalimantan Barat b. Melaksanakan apel persiapan sebelum melaksanakan kegiatan Razia c. Melakukan koordinasi dengan Dinas / Badan dan Unit kerja terkait yang berkaitan dengan kegiatan Razia Disiplin PNS				•	-	Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Provinsi Kalimantan Barat	1 hari		
4	Tim membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Kasat melalui Kasi dan Kabid	*	→	-	→	>	Alat Tulis Kantor, data kegiatan	1 hari	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
5	Mengagendakan, menggandakan dan mengarsipkan Laporan Kegiatan						Alat Tulis Kantor, data kegiatan	1 hari	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	